SISTEM PENYELENGGARAN PENDIDIKAN BERBASIS PANCASILA

Fatkhul Mubin

fatkhulmubin90@gmail.com

A. Latar belakang

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.¹

¹ Budi Wahyono., "Definisi dan Dasar Sistem Pendidikan Nasional", <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/definisi-dan-dasar-sistem-pendidikan.html>, Saihu, S. (2019). RINTISAN PERADABAN PROFETIK UMAT MANUSIA MELALUI PERISTIWA TURUNNYA ADAM AS KE-DUNIA. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, 3(2), 268-279,

Secara geografis Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari lautan dan beribu-ribu pulau, dimana di setiap daerah memiliki tradisi dan kebudayaan masing-masing. Keberagaman suku, tradisi, agama serta budaya inilah yang menjadi keunikan tersendiri bagi Indonesia dimata Internasional..

Nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika di harapkan dapat menjadi Integrasi nasional ditengah kemajemukan masyarakat. Integrasi nasional sendiri berarti menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian diberi tempat, sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam kesatuan Negara Republik Indonesia (Sunarso DKK, 2013: 193). Integrasi nasional yang dilandasi toleransi didambakan dapat mengatasi perbedaan suku, antargolongan, ras dan agama (SARA).

Maka pendidikan ddi indonesia atau Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang akan berakar dari pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dasar ini dapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945 alinea 4 batang tubuh UUD 1945 Bab XIII Pasal 31

Saihu, S. (2019). Pendidikan Pluralisme Agama: Kajian tentang Integrasi Budaya dan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Kontemporer. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(1), 67-90,

Saihu, S. (2019). IMPLEMENTASI MANAJEMEN BALANCED SCORECARD DI PONDOK PESANTREN JAM'ITYYAH ISLAMIYYAH TANGERANG SELATAN. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, 3(1), 1-22.

Saihu, S. (2019). KOMUNIKASI PENDIDIK TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH KHUSUS ASY-SYIFA LARANGAN. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(3), 418-440.

Saihu, S., & Marsiti, M. (2019). PENDIDIKAN KARAKTER DALAM UPAYA MENANGKAL RADIKALISME DI SMA NEGERI 3 KOTA DEPOK, JAWA BARAT. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 23-54.

Saihu, S. (2019). KONSEP MANUSIA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERUMUSAN TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT MURTADHA MUTHAHHARI. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 197-217.

B. Rumusan Masalah

1. Pengertian sistem penyelenggaraan pendidikan
2. Pendidikan nasional
3. Integrasi bangsa berdasarkan Pancasila.

PEMBAHASAN

A. Pengertian sistem penyelenggaraan pendidikan

Sistem berasal dari bahasa Latin (systema) dan bahasa Yunani (sustema) adalah satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi²

Menurut Pamudji bahwa sistem adalah suatu keseluruhan yang terorganisir atau suatu kebulatan yang kompleks.

Sedangkan penyelenggara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengurus dan mengusahakan sesuatu, seperti memelihara, mengatur dan merawat

² Mirza Maulinarhadi, Max Advian Noor, *Akuntansi pada aplikasi administrasi bisnis*, (Malang: Elektronik pertama dan terbesar di Indonesia, 2013) 2, Saihu, S., & Rohman, B. (2019). PEMBENTUKAN KARAKTER MELALUI MODEL PENDIDIKAN TRANSFORMATIF LEARNING PADA SANTRI DI PONDOK PESANTREN NURUL IKHLAS BALI. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(02), 435-452.

Saihu, S., & Taufik, T. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2(2), 105-116.

Saihu, S. (2020). KONSEP PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT FAZLURRAHMAN. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 82-95.

Saihu, S. (2020). ETIKA MENUNTUT ILMU MENURUT KITAB TA'LIM MUTA'ALIM. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 3(1), 99-112.

Saihu, Aziz, A., Mubin, F., & Sarnoto, A. Z. (2020). Design of Islamic education based on local wisdom (An analysis of social learning theories in forming character through ngejot tradition in Bali). *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6), 1278-1293.

Ronaldo, R., Zulfikar, A., Saihu, Ismail, & Wekke, I. S. (2020). International relations of the Asia Pacific in the age of Trump. *Journal of Environmental Treatment Techniques*, 8(1), 244-246.

Adapun pendidikan adalah Kata pendidikan berasal dari kata ‘didik’ dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan³.

Jadi sistem penyelenggara pendidikan adalah Penyelenggaraan pendidikan adalah satu kesatuan yang terdiri dari beberapa elemen untuk mengatur dan pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, nonformal, dan informal sesuai dengan kewenangan Pemerintah.

1. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui (tiga) jalur yaitu⁴

³ <https://www.zonareferensi.com/pengertian-pendidikan/>, Saihu, M. M., & Aziz, A. (2020). Implementasi Metode Pendidikan Pluralisme Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Belajea; Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 131-150.

Saihu, M. (2019). Urgensi ‘Urf dalam Tradisi Male dan Relevansinya dalam Dakwah Islam di Jembrana-Bali. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 173-201.

Saihu, S. (2020). The Effect of Using Talking Stick Learning Model on Student Learning Outcomes in Islamic Primary School of Jamiatul Khair, Ciledug Tangerang. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 6(01), 61-68.

Saihu, S. (2020). Pendidikan sosial yang terkandung dalam Surat At-Taubah Ayat 71-72. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(01), 127-148.

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia, Aziz, A., & Saihu, S. (2019). Interpretasi Humanistik Kebahasaan: Upaya Kontekstualisasi Kaidah Bahasa Arab. *Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab*, 3(2), 299-214

Saihu, S. (2019). PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI JEMBRANA BALI). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(01), 69-90.

Şahin, C. RELIGIA.

Saihu, S., & Mailana, A. (2019). Teori pendidikan behavioristik pembentukan karakter masyarakat muslim dalam tradisi Ngejot di Bali. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 163-176.

Mubin, F. KEADILAN DALAM GENDER: KAJIAN KEPEMIMPINAN WANITA DALAM ISLAM1,

Saihu, M. (2019). *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan Pluralisme Agama Di Jembrana-Bali)*. Deepublish.

Mubin, F. (2019). TAFSIR EMANSIPATORIS: PEMBUMIHAN METODOLOGI TAFSIR PEMBEBASAN. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, 3(1), 131-151.

a. Pendidikan formal

merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.

b. Pendidikan noformal

Pendidikan nonformal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar, adalah TPA, atau Taman Pendidikan Al Quran, yang banyak terdapat di setiap mesjid dan Sekolah Minggu, yang terdapat di semua gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, Tik, bimbingan belajar dan sebagainya.

c. Pendidikan informal

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan⁵

B. Pendidikan Nasional

Menurut Sunarya (1996), Pendidikan Nasional adalah suatu sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdikan kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut.

Sedangkan menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1976), merumuskan bahwa pendidikan nasional ialah suatu usaha untuk membimbing para

Mubin, F. MODEL-MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MADRASAH DAN KEGIATAN LAIN YANG DIPERLUKAN DI DALAMNYA (FAKTOR PENDUKUNGNYA).

⁵ <https://www.bphn.go.id/data/documents/89uu002.pdf>

warga negara Indonesia menjadi Pancasila, yang berpribadi, berdasarkan akan Ketuhanan, berkesadaran masyarakat dan mampu membudayakan alam sekitar.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan Pendidikan Nasional adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Menurut Zahar Idris (1987) mengemukakan bahwa "Pendidikan nasional sebagai suatu sistem adalah karya manusia yang terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai hubungan fungsional dalam rangka membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang sesuai dengan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional.

Menurut Sunarya, Pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdikan kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut.

Dalam Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I Pasal 2 berbunyi: Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar dari pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dasar ini dapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945 alinea 4 batang tubuh UUD 1945 Bab XIII Pasal 31⁶

2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

⁶ Fuad Ihsan, *Dasar Dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008,)107-108.

Fungsi Sistem Pendidikan Nasional adalah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.

3. Standar Pendidikan Nasional

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, pemerintah menetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan Indonesia yang menjadi pedoman bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut ini penjelasan 8 Standar Nasional Pendidikan Indonesia:

a. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

b. Standar Isi

Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

c. Standar Proses

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional, dan Kompetensi Sosial.

Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah,

tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan

f. Standar Pengelolaan Pendidikan

Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah

g. Standar Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

4. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Nasional

Sesuai Undang-Undang 20/2003 tentang Sisdiknas, ada 6 (enam) prinsip. Ketentuan ini, diatur pada bab II pasal 4 yang diuraikan dalam 6 ayat. Berikut isi undang-Undang 20/2003, pasal 4

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat

5. Jalur Pendidikan Nasional

a. Jalur Pendidikan Sekolah

Merupakan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan bersinambungan. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah, dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional.

- b. Jalur Pendidikan Luar Sekolah Merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak bersinambungan. Yang bersifat tidak formal dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional.

6. Jenjang Pendidikan Nasional

Merupakan suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran (UU RI No. 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5).

- a. Jenjang Pendidikan Dasar Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar dan juga berfungsi mempersiapkan peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. UU RI No 2 Tahun 1989 pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa “warga negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar”. Ayat 2 “warga negara yang berumur 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar/ yang setara sampai tamat.

- b. **Jenjang Pendidikan Menengah** Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA yang berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum, kedisiplinan, dan keagamaan.
- c. **Jenjang pendidikan tinggi** Merupakan lanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik/professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Pendidikan ini juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional.

C. Integrasi Bangsa Berdasarkan Pancasila.

Secara geografis Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari lautan dan beribu-ribu pulau, dimana di setiap daerah memiliki tradisi dan kebudayaan masing-masing. Keberagaman suku, tradisi, agama serta budaya inilah yang menjadi keunikan tersendiri bagi Indonesia dimata Internasional..

Nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika di harapkan dapat menjadi Integrasi nasional ditengah kemajemukan masyarakat. Integrasi nasional sendiri berarti menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian diberi tempat, sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam kesatuan Negara Republik Indonesia (Sunarso DKK, 2013: 193). Integrasi nasional yang dilandasi toleransi didambakan dapat mengatasi perbedaan suku, antargolongan, ras dan agama (SARA).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan ajang penanaman nilai yang berkaitan dengan pendidikan multicultural serta menjadi sumber nilai dan pedoman dalam mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini agar intelektual muda yang merupakan generasi pemerbaik bangsa mampu merealisasikan nilai-nilai

pancasila dalam realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu pendidikan Pancasila mengarahkan perilaku yang berdasarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan suku, agama, kebudayaan serta perilaku yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan individu dan golongan sebagai upaya terwujudnya keadilan sosial.

1. Pengertian Integrasi

Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Integration* yang memiliki arti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat.

Sedangkan jika dipandang dari segi politis, integrasi merupakan proses menyatukan berbagai kelompok sosial, aliran, dan kekuatan-kekuatan lainnya dari seluruh wilayah tanah air untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat, dinamis, berkeadilan sosial, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan menurut Paul B. Horton, integrasi adalah proses pengembangan masyarakat yang mana segenap kelompok ras dan etnik mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi⁷

Jadi integrasi adalah suatu proses menyatukan berbagai kelompok agar tidak saling bercerai berai atau menjadi suatu yang utuh.

1. Proses Integrasi⁸

Proses integrasi nasional biasanya akan dipengaruhi oleh aspek-aspek sosiologis dan antropologis. Dalam prosesnya, integrasi dituntut adanya kesepakatan terhadap nilai-nilai umum yang ada dalam masyarakat melalui proses :

- a. Sosialisasi

⁷ <https://www.pelajaran.co.id/2016/26/pengertian-integrasi-menurut-ahli-macam-macam-dan-faktor-pendorong-terjadinya-integrasi-lengkap.html>

⁸ <http://rahmirusnaf0.blogspot.com/2015/02/pancasila-semester-i-makalah-integrasi.html>

Sosialisasi adalah sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya.

b. Akulturasi

Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsure dari suatu kebudayaan asing, kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsure kebudayaan kelompok itu sendiri, contoh : saat budaya rap dari Negara asing digabungkan dengan bahasa jawa, sehingga menge-rap dengan bahasa jawa.

c. Asimilasi

Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi hal tersebut. Asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama.

d. Enkulturasasi

Enkulturasasi merupakan proses mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu dengan sistem norma, adat, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Menurut M.J Herskovits, enkulturasasi adalah suatu proses bagi seseorang baik sadar maupun tidak sadar, mempelajari seluruh kebudayaan masyarakat.

Contoh bentuk integrasi nasional adalah sumpah pemuda yang menghasilkan nasionalisme dan menyatukan rakyat Indonesia secara sosial dan politik, melalui sembojannya “ satu tanah air, satu bahasa , satu bangsa “.

2. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional.

a. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan sepejuangan.

- b. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.
- c. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan
- d. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan.
- e. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia.

3. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional sebagai berikut:

- a. Masyarakat Indonesia yang heterogen (beraneka ragam) dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya.
- b. Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas.
- c. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- d. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa.
- e. Adanya paham “etnosentrisme” di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem Penyelenggaraan pendidikan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa elemen untuk mengatur dan pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, nonformal, dan informal sesuai dengan kewenangan Pemerintah.

integrasi adalah suatu proses menyatukan berbagai kelompok agar tidak saling bercerai berai atau menjadi suatu yang utuh.

Proses integrasi nasional biasanya akan dipengaruhi oleh aspek-aspek sosiologis dan antropologis. Dalam prosesnya, integrasi dituntut adanya kesepakatan terhadap nilai-nilai umum yang ada dalam masyarakat melalui proses sosialisasi, akulturasi, asimilasi, dan akulturasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A., & Saihu, S. (2019). Interpretasi Humanistik Kebahasaan: Upaya Kontekstualisasi Kaidah Bahasa Arab. *Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab*, 3(2), 299-214
- Budi Wahyono., “Defenisi dan Dasa Sistem Pendidikan Nasional”, <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/definisi-dan-dasar-sistem-pendidikan.html>
- Fuad Ihsan, Dasar Dasar Kependidikan,(Jakarta: Rineka Cipta, 2008,)107-108
- <http://rahmirusnaf0.blogspot.com/2015/02/pancasila-semester-i-makalah-integrasi.html>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia
- <https://www.bphn.go.id/data/documents/89uu002.pdf>
- <https://www.pelajaran.co.id/2016/26/pengertian-integrasi-menurut-ahli-macam-macam-dan-faktor-pendorong-terjadinya-integrasi-lengkap.html>
- <https://www.zonareferensi.com/pengertian-pendidikan/>
- Mirza maularhadi,max advian noor,*Akuntansi pada aplikasi administrasi bisnis*, malang:Elektronik pertama dan terbesar di indonesia,2013 2
- Mubin, F. (2019). TAFSIR EMANSIPATORIS: PEMBUMIHAN METODOLOGI TAFSIR PEMBEBASAN. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, 3(1), 131-151.
- Mubin, F. KEADILAN DALAM GENDER: KAJIAN KEPEMIMPINAN WANITA DALAM ISLAM1,
- Mubin, F. MODEL-MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MADRASAH DAN KEGIATAN LAIN YANG DIPERLUKAN DI DALAMNYA (FAKTOR PENDUKUNGNYA).
- Ronaldo, R., Zulfikar, A., Saihu, Ismail, & Wekke, I. S. (2020). International relations of the asia pacific in the age of trump. *Journal of Environmental Treatment Techniques*, 8(1), 244–246.
- Şahin, C. RELIGIA.

- Saihu, Aziz, A., Mubin, F., & Sarnoto, A. Z. (2020). Design of islamic education based on local wisdom (An analysis of social learning theories in forming character through ngejot tradition in bali). *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6), 1278–1293.
- Saihu, M. (2019). Urgensi ‘Urf dalam Tradisi Male dan Relevansinya dalam Dakwah Islam di Jembrana-Bali. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 173-201.
- Saihu, M. (2019). *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan Pluralisme Agama Di Jembrana-Bali)*. Deepublish.
- Saihu, M. M., & Aziz, A. (2020). Implementasi Metode Pendidikan Pluralisme Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Belajea; Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 131-150.
- Saihu, S. (2019). IMPLEMENTASI MANAJEMEN BALANCED SCORECARD DI PONDOK PESANTREN JAM’IYYAH ISLAMIYYAH TANGERANG SELATAN. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, 3(1), 1-22.
- Saihu, S. (2019). KOMUNIKASI PENDIDIK TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH KHUSUS ASY-SYIFA LARANGAN. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(3), 418-440.
- Saihu, S. (2019). KONSEP MANUSIA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERUMUSAN TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT MURTADHA MUTHAHHARI. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 197-217.
- Saihu, S. (2019). PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI JEMBRANA BALI). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(01), 69-90.
- Saihu, S. (2019). Pendidikan Pluralisme Agama: Kajian tentang Integrasi Budaya dan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Kontemporer. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(1), 67-90,
- Saihu, S. (2019). RINTISAN PERADABAN PROFETIK UMAT MANUSIA MELALUI PERISTIWA TURUNNYA ADAM AS KE-DUNIA. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, 3(2), 268-279,
- Saihu, S. (2020). ETIKA MENUNTUT ILMU MENURUT KITAB TA’LIM MUTA’ALIM. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 3(1), 99-112.
- Saihu, S. (2020). KONSEP PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT FAZLURRAHMAN. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 82-95.
- Saihu, S. (2020). Pendidikan sosial yang terkandung dalam Surat At-Taubah Ayat 71-72. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(01), 127-148.

- Saihu, S. (2020). The Effect of Using Talking Stick Learning Model on Student Learning Outcomes in Islamic Primary School of Jamiatul Khair, Ciledug Tangerang. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 6(01), 61-68.
- Saihu, S., & Mailana, A. (2019). Teori pendidikan behavioristik pembentukan karakter masyarakat muslim dalam tradisi Ngejot di Bali. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 163-176.
- Saihu, S., & Marsiti, M. (2019). PENDIDIKAN KARAKTER DALAM UPAYA MENANGKAL RADIKALISME DI SMA NEGERI 3 KOTA DEPOK, JAWA BARAT. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 23-54.
- Saihu, S., & Rohman, B. (2019). PEMBENTUKAN KARAKTER MELALUI MODEL PENDIDIKAN TRANSFORMATIFE LEARNING PADA SANTRI DI PONDOK PESANTREN NURUL IKHLAS BALI. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(02), 435-452.
- Saihu, S., & Taufik, T. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2(2), 105-116.